



PEMERINTAH
KOTA BATAM

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 102 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

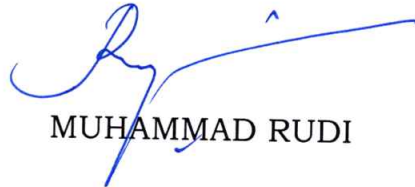
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1442

KATA PENGANTAR

Atas Berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2025. Rancangan Akhir Renja ini merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Batam.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah serta mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 yang disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 222 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan menyelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara

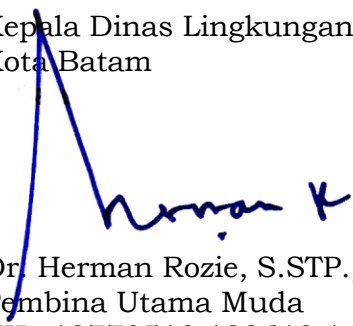
administrasi.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Batam, 08 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770512 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup..... 28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup..... 45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 48

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 49

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 63

BAB V PENUTUP 73

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 73

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan 73

5.3 Rencana Tindak Lanjut 74

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	26
Tabel 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.....	27
Tabel 2.4. <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2025.....	31
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2025	43
Tabel 3.1. Target, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	49
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam .	54
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Formulir E.70
- B. SK Tim

BAB I PENDAHULUAN

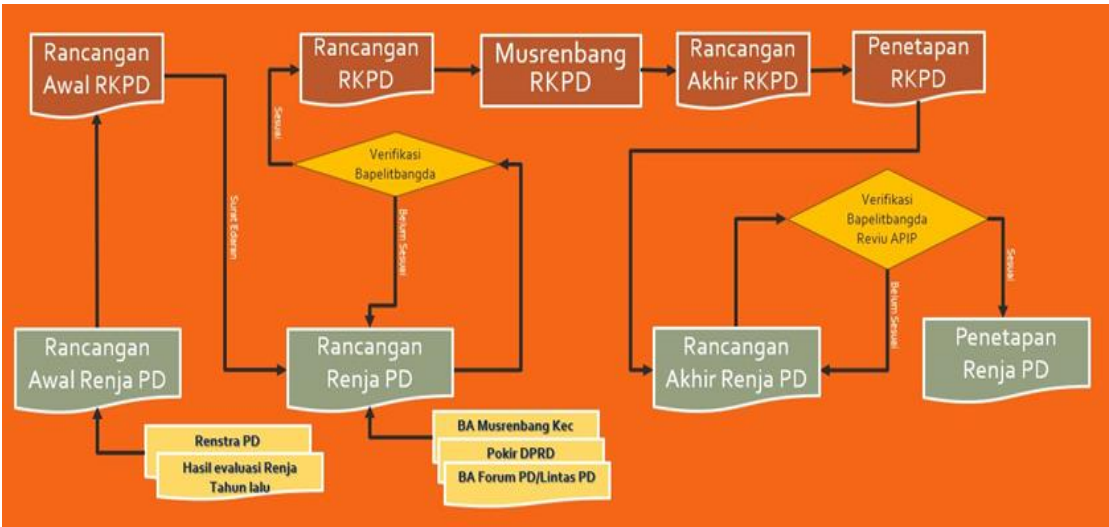
1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja;
- b. penyusunan rancangan awal Renja;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir Renja;
- e. Penetapan Renja.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-2 (dua), yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang”**.

Adapun sasaran yang akan dicapai, yaitu :

- a. Terwujudnya pemanfaatan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, bersih, nyaman, dan terpadu serta Kawasan permukiman yang layak huni.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam;
 24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
 26. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 28. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup;
 29. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 222 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu periode 1 (satu) tahun

yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah :

1. Sebagai koridor pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2025;
2. Sebagai bahan acuan penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangann Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2023 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2023 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah melaksanakan sejumlah program melalui kegiatan yang ada dengan dana APBD Perubahan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp **96.722.824.686** (Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dan serapan keuangan tahun 2023 sebesar Rp. **90.521.643.487,00,-** (Sembilan Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau **93,59%** dan realisasi fisik sebesar **100%**.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							(2025)	(2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	(2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									(2023)	(2023)			(2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	77 Orang/Bulan	100%	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	100%
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							(2025)	(2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							(2025)	(2022)	(2023)	(2023)		(2024)	(2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100%
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	01	2.09	02	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	81 Unit	81 Unit	100%	185 Unit	185 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	(2025)	(2022)	(2023)	(2023)		(2024)	(2024)	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	190 Unit	71 Unit	71 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	11	02	.		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							(2025)		(2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
2	11	03	.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,59; 89,62; 70,09	55,28; 87,71; 51,55	52,47; 88,76; 69,08	52,00; 84,12; 62,64	100%	53,42; 88,89; 69,52	53,42; 88,89; 69,52	100%	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	55,28; 87,71; 51,55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara dan laut	1500 Dokumen	3 Dokumen	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-	100%	-	-	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							(2025)		(2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
										(2023)	(2023)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
2	11	03	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	54 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	49 Dokumen	49 Dokumen	100%	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	7 Laporan	-	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	100%	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	12 Titik	-	-	-	-	10 Titik	10 Titik	100%	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							(2025)		(2022)	(2023)	(2023)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24 Dokumen	-	-	-	-	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	70%	-	-	-	-	60%	60%	100%	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	70%	-	-	-	-	60%	100%	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							1					2	3	(2025)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100 Laporan	-	-	-	-	100 Laporan	100 Laporan	100%
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	25 Dokumen	-	-	-	-	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							(2025)	(2022)	(2023)	(2023)		(2024)	(2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 Jumlah	100%	100%	100%	100%	3 Jumlah	3 Jumlah	100%
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	7 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	11	11	.		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	26%	30%	18%	18%	100%	22%	22%	100%
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan dimanfaatkan	26%	30%	18%	18%	100%	22%	22%	100%
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							(2025)		(2022)	(2023)	(2023)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	312.410 Ton	295152 Ton	298.404 Ton	298.404 Ton	100%	305.327 Ton	305.327 Ton	100%	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	36 Unit	12 Unit	32 Unit	32 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100%	
2	11	11	2.01	09	Pengoprasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	-	-	-	-	148 Unit	148 Unit	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							(2025)		(2022)	(2023)			(2023)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6x100	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
2	11	11	2.01	12	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton	-	-	-	-	310.037 Ton	310.037 Ton	100%
2	11	11	2.01	18	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	11	11	2.01	19	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2.600 Ton	-	-	-	-	2.600 Ton	2.600 Ton	100%
2	11	11	2.01	20	Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	305.327 Ton	-	-	-	-	310.037 Ton	310.037 Ton	100%

I. Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2023.

Dari tabel **Tabel 2.1** dapat dijelaskan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 menurut indikator program yang telah terealisasi dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 12.384.171.496,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.037.666.442,00 (97,20%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 113.820.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 113.215.000,00 (99,47%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 107.677.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 102.249.000,00 (94,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 5.250.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- (0%) dan realisasi fisik sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kantor yang tidak menyediakan makan dan minum untuk rapat-rapat internal dan adanya miskomunikasi internal antara PPTK dan perencana dimana seharusnya kegiatan ini dihapuskan di APBDP.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 72.578.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 57.637.500,00 (79,41%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 188.350.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 120.923.823,00 (64,20%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 421.128.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 370.154.503,00 (87,90%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 1.080.537.280,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 964.665.292,00 (89,28%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 798.523.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 653.460.100,00 (81,83%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 57.550.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 54.731.000,00 (95,10%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 6.334.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.080.000,00 (80,19%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - A. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 352.974.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 228.280.426,00 (64,67%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - A. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 137.523.000,00 dengan realisasi keuangan

- sebesar Rp 124.543.349,00 (90,56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 232.868.797,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 164.684.562,00 (70,72%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- A. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 115.412.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 110.037.110,00 (95,34%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
5. Program Pengelolaan Persampahan;
- A. Kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - a) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 2.311.647.020,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.769.088.017,00 (76,53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 6.635.869.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.357.470.000,00 (95,80%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 71.700.609.943,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 67.287.757.363,00 (93,85%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

II. Analisa Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2024.

Analisa perkiraan pencapaian Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2024 menurut indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 15.984.370.972,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 15.984.370.972,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 61.856.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 61.856.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 251.296.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 251.296.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 449.027.200,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 449.027.200,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 449.302.880,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 449.302.880,00 (89,28%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- D. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a) Sub Kegiatan Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 899.318.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 899.318.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 27.560.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 27.560.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp

- 4.800.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 4.800.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - A. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 336.442.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 336.442.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - A. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 88.082.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 88.082.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 576.973.003,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 576.973.003,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - A. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 51.089.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 51.089.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - A. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;
 - a) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Anggaran

Tahun 2024 sebesar Rp 66.997.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 66.997.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - A. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
 - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 56.545.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 56.545.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
7. Program Pengelolaan Persampahan;
 - A. Kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 3.193.814.054,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 3.193.814.054,00 (76,53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 392.978.000,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 392.978.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - c) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 20.621.030.806,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 20.621.030.806,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - d) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 48.116.904.840,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 48.116.904.840,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - e) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 2.438.823.520,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 2.438.823.520,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - f) Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 372.207.840,00

dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 372.207.840,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- g) Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional. Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 5.982.967.600,00 dengan perkiraan realisasi keuangan sebesar Rp 5.982.967.600,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam selama tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	n/a	70,00	70,50	71	71,5	67,34	70,50	71	71,5	
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	n/a	n/a	52,47	53,42	53,59	55,19	52,00	53,42	53,59	55,19	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	n/a	n/a	88,76	88,89	89,62	90,93	84,12	88,89	89,62	90,93	
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	n/a	n/a	69,08	69,52	70,09	70,42	62,64	69,52	70,09	70,42	
5	Persentase Pengelolaan Sampah	n/a	n/a	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	
6	Persentase Pengurangan Sampah	n/a	n/a	18%	22%	26%	30%	18%	22%	26%	30%	

Catatan : *Realisasi capaian tahun 2024 masih merupakan asumsi karena belum dapat dihitung.

Pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023 belum memenuhi target karena kurangnya jumlah dan kapasitas SDM staf untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam kegiatan pengendalian pencemaran udara. Untuk memperbaiki capaian target IKU maka perlu dilakukan program perbaikan kualitas udara yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi serta kesiapan anggaran serta melakukan pemantauan kualitas udara dan menambah jumlah titik sampling dengan penggunaan APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan.

Pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 belum memenuhi target karena kurangnya jumlah dan kapasitas SDM staf untuk mengawasi dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan, pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestic, kurangnya pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air dan kurangnya koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

Pencapaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023 belum memenuhi target karena Perlu melakukan identifikasi dan pemetaan eksisting RTH untuk mempermudah kegiatan pemantauan melalui citra satelit serta kurang maksimalnya pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.

Tabel 2.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	185 Unit	185 Unit	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100%
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100%
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	49 Dokumen	49 Dokumen	100%
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	100%
2	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 Unit	9 Unit	100%
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

		kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan			
		Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	148 Unit	100%
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	305.327 Ton	305.327 Ton	100%
		Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	2600 Ton	100%
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	305.327 Ton	305.327 Ton	100%

Catatan : Realisasi dan tingkat capaian tahun 2024 masih merupakan asumsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Faktor yang mendorong untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah, udara dan air);
- b. Kurangnya kesadaran & partisipasi masyarakat dalam pengelolaan LH;
- c. Keterbatasan Sarana Prasarana dan sumber dana yang memadai;
- d. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
- e. Kondisi iklim dan pemanasan global;

- f. Belum terakreditasinya laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam;
- g. Penanaman magrove dan pohon.

2.3.3 Peluang dan Tantangan.

Adapun peluang dalam peningkatan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dalam program Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, dan sebagainya;
- c. Tuntutan global terhadap pemanfaatan teknologi masa depan yang ramah lingkungan hidup;
- d. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan.

Adapun tantangan dalam peningkatan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik dan bersih;
- b. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- d. Peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor;
- e. Semakin berkembangnya industri yang menyebabkan semakin meningkatnya beban pencemaran;
- f. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tanpa memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencoba beberapa strategi untuk menghadapi permasalahan di atas, yang

diharapkan dapat meminimalkan atau mengurangi permasalahan yang ada. Adapun upaya untuk memperbaiki masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Mengurangi laju pencemaran dan kerusakan lingkungan secara optimal dan terpadu
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis SKPD periode 2021-2026 yang telah disusun, dan diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada dasarnya yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sudah merupakan kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup guna mendukung fungsi perlindungan dan pengawasan lingkungan hidup dan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Batam. Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Batam Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 107.357.228.998	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 108,452,455,992	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp19.417.580.913	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp19.417.580.913	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100%	Rp60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	100%	Rp60.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp15.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Rp15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	Rp15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	Rp15.000.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	Rp15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	Rp15.000.000	
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	Rp250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	Rp250.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Rp250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Rp250.000.000	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	Rp839.123.285	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi umum terlaksana	100%	Rp839.123.285	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp26.501.471	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp26.501.471	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp163.086.680	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp163.086.680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp44.775.654	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp44.775.654	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp104.219.940	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp104.219.940	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	Rp6.050.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	Rp6.050.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp494.489.540	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp494.489.540	
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	Rp109.654.055	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	Rp109.654.055	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp109.654.055	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp109.654.055	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100%	Rp1.684.806.284	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	100%	Rp1.684.806.284	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp464.340.800	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp464.340.800	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1.220.465.484	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 1.220.465.484	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	Rp1.629.947.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	100%	Rp1.629.947.000	
1	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Rp1.353.864.000	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Rp1.353.864.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	Rp191.603.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	190 Unit	Rp191.603.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Rp84.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	Rp84.480.000	
VII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	Rp14.844.050.289	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	100%	Rp15,609,817,283	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77 Orang/bulan	Rp14.844.050.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Orang/bulan	Rp15,609,817,283	
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp395.403.571	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp395.403.571	
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp395.403.571	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	100%	Rp395.403.571	
1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Batam	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Rp395.403.571	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Batam	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Rp395.403.571	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	Rp1.776.190.493	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	Rp2.105.650.493	
I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp1.326.190.493	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp1.655.650.493	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kota Batam	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	1500 Dokumen	Rp350.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kota Batam	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	1500 Dokumen	Rp350.000.000	
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Lingkungan	54 Dokumen	Rp976.190.493	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Lingkungan	54 Dokumen	Rp976.190.493	
3	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp329.460.000	Berdasarkan Forum OPD DLH wajib melaksanakan kegiatan ini
II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp120.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Rp120.000.000	
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	7 Laporan	Rp50.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Batam	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	7 Laporan	Rp50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	12 Titik	Rp70.000.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	12 Titik	Rp70.000.000	
III	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Rp330.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Rp330.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24 Dokumen	Rp330.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	24 Dokumen	Rp330.000.000	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Batam	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	70%	Rp1.181.195.004	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Batam	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	70%	Rp1.181.195.004	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	70%	Rp1.181.195.004	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	70%	Rp1.181.195.004	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Batam	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	Rp1.031.195.004	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Batam	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 Dokumen	Rp1.031.195.004	
2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	Rp150.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 Badan Usaha	Rp150.000.000	
E	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	Rp211.421.166	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	Rp211.421.166	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2 Jumlah	Rp211.421.166	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	2 Jumlah	Rp211.421.166	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	7 Dokumen	Rp211.421.166	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	7 Dokumen	Rp211.421.166	
F	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	Rp165.904.207	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Batam	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	Rp165.904.207	
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	Rp165.904.207	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	5 Jumlah	Rp165.904.207	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	Rp165.904.207	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Batam	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	Rp165.904.207	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90%	Rp2.255.008.644	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Batam	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	90%	Rp2.255.008.644	
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90%	Rp2.255.008.644	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase pengaduan yang terselesaikan	90%	Rp2.255.008.644	
1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	49 Pengaduan	Rp255.008.644	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	49 Pengaduan	Rp255.008.644	
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	Rp2.000.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	Rp2.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	26%	Rp81.954.525.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah	26%	Rp81.954.525.000	
I	Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan termanfaatkan	26%	Rp81.954.525.000	Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah telah terdaur ulang dan termanfaatkan	26%	Rp81.954.525.000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	36 Unit	Rp9.089.707.968	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	36 Unit	Rp9.089.707.968	
2	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	Rp13.866.813.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Kota Batam	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	148 Unit	Rp13.866.813.000	
3	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton	Rp48.937.517.040	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Batam	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	310.037 Ton	Rp48.937.517.040	
4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	Rp2.266.856.400	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	Rp2.266.856.400	
5	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Batam	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	Rp424.955.360	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Batam	Jumlah sampah yang terdaur ulang	2600 Ton	Rp424.955.360	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
					(Rp.)					(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Batam	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	310.037	Rp7.368.675.232	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Batam	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional	310.037	Rp7.368.675.232		
JUMLAH					Rp107.357.228.998	JUMLAH					Rp108,452,455,992	

Terdapat perubahan Pagu Anggaran dari Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 107.357.228.998 menjadi Rp 108.452.455.992 setelah dilakukan Analisis Kebutuhan. Hal ini dikarenakan adanya rencana penambahan pagu anggaran pada 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pada rancangan awal RKPD jumlah pagu sebesar Rp14.844.050.289 bertambah menjadi Rp15.609.817.283. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dari 77 orang menjadi 93 orang.
2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, pada rancangan awal RKPD jumlah pagu sebesar Rp1.326.190.493 bertambah menjadi Rp1.655.650.493. hal ini dikarenakan adanya kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang sudah disetujui dalam Desk Forum OPD, dimana pada Rancangan Awal RKPD kegiatan tersebut tidak terakomodir. Pagu yang dibutuhkan sebesar Rp329.460.000.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja PD selain berasal dari rencana kerja pemerintah daerah, juga mempertimbangkan usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu tujuan system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulam program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) maupun melalui aspirasi DPRD yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran Dewan. Terdapat beberapa usulan masyarakat dan pokir Dewan yang terangkum dalam RKPD Kota Batam tahun 2025. Berikut adalah tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan kota Batam tahun 2025.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota
Batam Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Batam	Persentase Pengurangan Sampah		
A	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Kota Batam	Persentase timbulan sampah dan sampah teilah terdaur ulang dan termanfaatkan		
1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
	a. Pembangunan TPS Permanen	Rusun Winsor Phase, RT 02, RW 09	-	1 Unit	Sesuai Dengan Kesepak atan Desk Pokir
	b. Pengadaan Becak Pengangkut Sampah	Kelurahan Pulau Buluh	-	-	Usulan Aspirasi masyara kat

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	c. Pengadaan Bin Kontainer	Kantor Lurah Buliang	-	-	Usulan Aspirasi masyara kat
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Bak Kontainer Sampah)	Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong	-	1 Unit	Usulan di Desk Pokir
	e. Pengadaan Tong Sampah	Tembesi Makmur RT 008 RW 001 Kelurahan Kibing	-	1 Paket	Usulan di Desk Pokir
	f. Pengadaan Bak Sampah	RW 017 Perum Buana Bukit Permata Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung	-	1 Paket	Usulan di Desk Pokir
	g. Tempat Sampah	Sei Beduk dan Nongsa	-	1 Paket	Usulan di Desk Pokir

Semua Usulan sesuai dengan table 2.5 di atas, baik berupa Aspirasi dan Pokir DPRD Kota Batam Tahun 2025 akan diakomodir oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan azas kelengkapan readiness criteria (kelengkapan pendukung) dan ketersediaan dana.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3. Menerapkan Pendekatan Pembangunan Rendah Karbon.

Dari tiga kebijakan tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksanaan kebijakan publik, yaitu “**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**”. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pembangunan sumberdaya manusia yang masih timpang. Pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam, sehingga menyebabkan deplesi dan degradasi lingkungan, dimana kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan masih rendah.

Sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yang menyentuh bidang lingkungan hidup terdapat pada poin (2) adalah: Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sedangkan arahan kebijakan dan strategi pembangunan terdapat pada poin (3) yaitu, Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi Gas Rumah

Kaca (GRK); (iv) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup menjadi modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH, namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam lima tahun mendatang dihadapi yaitu: 1) produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun; 2) sistem irigasi termasuk kondisi waduk pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan; 3) produktivitas dan daya saing hasil perikanan belum optimal; 4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal; 5) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi; 6) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal; 7) sumber daya air belum terkelola dengan baik; 8) belum pulihnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional; 9) luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi; 10) kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal; 11) pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal; 12) dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan; 13) frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

Untuk melaksanakan pembangunan SDA dan LH dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan, terdapat 11 (sebelas) isu strategis yang perlu ditangani, yaitu: 1) pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; 2) pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani; 3) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengelola dan pemasar hasil perikanan/petambak garam; 4) peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; 6) peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; 7) penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi; 8) peningkatan nilai tambah industri mineral dan

pertambangan berkelanjutan; 9) peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; 10) penganggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; 11) penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap lingkungan hidup adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang dilakukan selalu mempertimbangkan kaidah – kaidah lingkungan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 32 Tahun 2009, setiap rencana pembangunan harus menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan setiap Rencana, Kebijakan, dan Program yang diterbitkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Agar amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diciptakan instrument-instrument pengelolaan lingkungan yang antara lain :

- 1) KLHS;
- 2) Tata Ruang;
- 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- 4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5) Amdal;
- 6) UKL-UPL;
- 7) Perizinan;
- 8) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- 9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- 12) Audit Lingkungan Hidup; dan
- 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lampiran h tentang kewenangan daerah dalam bidang lingkungan hidup, dimana target-target pada regulasi di atas diakomodasi dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Bidang Lingkungan Hidup dengan mensinkronkan terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun sebagai pedoman perencanaan penyusunan kegiatan pada tahun berjalan, dengan tujuan antara lain :

- a. Terwujudnya Kota Batam yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang;
- b. Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Tersedianya peralatan dan fasilitas minimum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan;
- d. Terwujudnya ketaatan pelaku kegiatan usaha serta masyarakat terhadap peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang diterapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui Tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 5 (lima) tahun kedepan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menetapkan sasaran sebagai berikut:

- d. Terwujudnya pemanfaatan dan tata ruang yang berwawasan lingkungan;

- e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tamping lingkungan;
- f. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, bersih, nyaman, dan terpadu serta Kawasan permukiman yang layak huni.

Tabel 3.1.
Target, Tujuan dan Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1	Terlaksananya upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71
		Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,62
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	70,09
2	Terlaksananya peningkatan pengelolaan persampahan di Kota Batam	Persentase Pengelolaan Sampah	67,25%
		Persentase Pengurangan Sampah	26,00%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirincidalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk tahun anggaran 2025 juga mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- g) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

B. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota:
 - 1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

C. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 - 2. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 - 2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

F. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

- a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

- a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

H. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- a) Kegiatan Pengelolaan Sampah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
 - 2. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah;
 - 3. Penanganan sampah melalui pengangkutan;
 - 4. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah;
 - 5. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah;
 - 6. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

Pada tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 8 (delapan) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp 107.686.688.998 (Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Batam.

Berikut adalah tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam:

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp108,452,455,992				Rp110.788.788.311
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100%	Rp19.417.580.913	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp20.161.274.262
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Kota Batam	100%	Rp60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp60.000.000
2	11	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Batam	2 Dokumen	Rp15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	Rp15.000.000
2	11	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Batam	2 Dokumen	Rp15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	Rp15.000.000
2	11	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Batam	2 Laporan	Rp15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	Rp15.000.000

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Batam	4 Laporan	Rp15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	Rp15.000.000
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	Kota Batam	100%	Rp15,609,817,283	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp15,609,817,283
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Batam	93 Orang/bulan	Rp15,609,817,283	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan Gaji & Tunjangan PPPK	93 Orang/bulan	Rp15,609,817,283
2	11	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	Kota Batam	100%	Rp250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp250.000.000
2	11	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	15 Orang	Rp250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Orang	Rp250.000.000
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminstrasi umum terlaksana	Kota Batam	100%	Rp839.123.285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp952.535.615
2	11	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kota Batam	1 Paket	Rp26.501.471	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	Rp29.151.618
2	11	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Kota Batam	1 Paket	Rp163.086.680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	Rp180.895.349
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kota Batam	1 Paket	Rp44.775.654	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	Rp49.253.219

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan kantor tersedia	Kota Batam	2 Paket	Rp104.219.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	Rp114.641.934
2	11	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Kota Batam	5 Dokumen	Rp6.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	Rp6.655.000
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terlaksana	Kota Batam	50 Laporan	Rp494.489.540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Laporan	Rp571.938.495
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	Rp109.654.055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp122.119.460
2	11	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Batam	7 Unit	Rp109.654.055	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	Rp122.119.460
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Kota Batam	100%	Rp1.684.806.284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp1.853.286.912
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	1 Laporan	Rp464.340.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp510.774.880
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Batam	12 Laporan	Rp1.220.465.484	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	Rp1.342.512.032
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam	100%	Rp1.629.947.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp1.959.947.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	209	02	Penyedia jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Batam	24 Unit	Rp1.353.846.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	Rp1.645.467.000
2	11	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Batam	190 Unit	Rp191.603.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		190 Unit	Rp220.000.000
2	11	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kota Batam	1 Unit	Rp84.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	Rp94.480.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Kota Batam	100%	Rp395.403.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp410.547.527
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Kota Batam	100%	Rp395.403.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp410.547.527
2	11	02	201	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	Rp210.547.527
2	11	02	201	06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Batam	1 Dokumen	Rp395.403.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp200.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Kota Batam	53,59; 89,62; 70,09	Rp2.105.650.493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55,19; 90,93; 70,42	Rp1.844.218.589

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	Rp1.655.650.493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp1.324.218.589
2	11	03	201	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kota Batam	1500 Dokumen	Rp350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1500 Dokumen	Rp370.000.000
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Kota Batam	1 Dokumen	Rp329.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembahasan Desk Pada Forum RKPd	-	-
2	11	03	201	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Lingkungan	Kota Batam	54 Dokumen	Rp976.190.493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		59 Dokumen	Rp954.218.589
2	11	03	202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	Rp120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp140.000.000
2	11	03	202	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Batam	7 Laporan	Rp50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Laporan	Rp60.000.000
2	11	03	202	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang di hentikan	Kota Batam	12 Titik	Rp70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Titik	Rp80.000.000
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam	100%	Rp330.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp380.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	203	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kota Batam	24 Dokumen	Rp330.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27 Dokumen	Rp380.000.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perizinan yang Dibina dan Diawasi	Kota Batam	70%	Rp1.181.195.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	Rp1.226.434.773
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Kota Batam	70%	Rp1.181.195.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80%	Rp1.226.434.773
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kota Batam	20 Dokumen	Rp1.031.195.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	Rp1.076.434.773
2	11	06	201	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Batam	100 Badan Usaha	Rp150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Badan Usaha	Rp150.000.000

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kota Batam	100%	Rp211.421.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp219.518.596
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kota Batam	2 Jumlah	Rp211.421.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Jumlah	Rp219.518.596
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kota Batam	7 Dokumen	Rp211.421.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	Rp219.518.596
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakaat	Kota Batam	100%	Rp165.904.207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	Rp172.258.339
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaaaan lingkungan hidup	Kota Batam	5 Jumlah	Rp165.904.207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Jumlah	Rp172.258.339
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang di nilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Batam	3 Entitas	Rp165.904.207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Entitas	Rp172.258.339
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Kota Batam	90%	Rp2.255.008.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90%	Rp2.341.375.475

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Kota Batam	90%	Rp2.255.008.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90%	Rp2.341.375.475
2	11	10	201	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Batam	49 Pengaduan	Rp255.008.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45 Dokumen	Rp341.375.475
2	11	10	201	06	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Batam	2 Perkara	Rp2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Perkara	Rp2.000.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	Kota Batam	26%	Rp81.954.525.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30%	Rp84.413.160.750
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah dan sampah teilah terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam	26%	Rp81.954.525.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30%	Rp84.413.160.750
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Batam	36 Unit	Rp9.089.707.968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		34 Unit	Rp8.853.535.683
2	11	11	201	09	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kota Batam	148 Unit	Rp13.866.813.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148 Unit	Rp14.105.575.883
2	11	11	201	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Kota Batam	310.037 Ton	Rp48.937.517.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		312.410 Ton	Rp52.683.350.327

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	11	201	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kota Batam	2 Laporan	Rp2.266.856.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp1.345.623.623
2	11	11	201	19	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kota Batam	2.600 Ton	Rp424.955.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.600 Ton	Rp467.450.869
2	11	11	201	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kota Batam	310.037 Ton	Rp7.368.675.232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		319.658 Ton	Rp6.957.624.338
JUMLAH									Rp108,452,455,992				Rp110.788.788.311

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target sebesar capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif.

Dengan diterbitkannya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-588 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan indikator pada sub kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Adapun program, kegiatan dan rincian sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									108,452,455,992,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									108,452,455,992,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									108,452,455,992,00		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									19.417.580.913,00		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									60.000.000,00		
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	2 Dokumen	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	2 Dokumen	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	2 Laporan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	4 Laporan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,609,817,283,00		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	93 Orang/bulan	100 %	15,609,817,283,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								250.000.000,00		
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase administrasi kepegawaian terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	15 Orang	100 %	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								839.123.285,00		
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Paket	100 %	26.501.471,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Paket	100 %	163.086.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Paket	100 %	44.775.654,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

						pemerintahan daerah									
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan kantor tersedia	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	2 Paket	100 %	104.219.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	5 Dokumen	100 %	6.050.000,00		
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum terlaksana	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	50 Laporan	100 %	494.489.540,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								109.654.055,00		
2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	7 Unit	100 %	109.654.055,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.684.806.284,00		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Laporan	100 %	464.340.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	12 Laporan	100 %	1.220.465.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.629.947.000,00		
2	11	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	24 Unit	100 %	1.353.846.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	190 Unit	100 %	191.603.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Unit	100 %	84.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							395.403.571,00		
2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							395.403.571,00		
2	11	02	2.01	0006		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	1 Dokuman	100 %	395.403.571,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							2.105.650.493,00		
2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							1.655.650.493,00		
2	11	03	2.01	0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									

						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	1500 Dokumen	100 %	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										
						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	1 Dokumen	100 %	329.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										
						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan Oleh Laboratorium Lingkungan	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	54 Dokumen	100 %	976.190.493,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								120.000.000,00		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	7 Laporan	100 %	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	12 Titik	100 %	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								330.000.000,00		
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran										

						Indeks kualitas air (IKA); Indeks kualitas udara (IKU); Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	53,59; 89,62; 70,09 Indeks	24 Dokumen	100 %	330.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								1.181.195.004,00		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.181.195.004,00		
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH										
						Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	70 %	20 Dokumen	70 %	1.031.195.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
						Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	70 %	100 Badan Usaha	70 %	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								211.421.166,00		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								211.421.166,00		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
						Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	7 Dokumen	3 Jumlah	211.421.166,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								165.904.207,00		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								165.904.207,00		

2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup											
						Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	100 %	3 Entitas	5 Jumlah	165.904.207,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									2.255.008.644,00		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									2.255.008.644,00		
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota											
						Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Jumlah pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	90 %	49 Pengaduan	90 %	255.008.644,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota											
						Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Persentase pengaduan yang terselesaikan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	2 Perkara	90 %	2.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									81.954.525.000,00		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah									81.954.525.000,00		
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
						Persentase pengurangan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	26 %	36 Unit	26 %	9.089.707.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

2	11	11	2.01	0009	Pengoprasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah												
						Persentase pengurangan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Sekupang, Semua Kel/Desa	26 %	148 Unit	26 %	13.866.813.000`,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	11	11	2.01	0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan												
						Persentase pengurangan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 %	310.037 Ton	26 %	48.937.517.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah												
						Persentase pengurangan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 %	2 Laporan	26 %	2.266.856.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah												
						Persentase pengurangan sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 %	2.600 Ton	26 %	424.955.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
2	11	11	2.01	0020	Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional												

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA TAHUN 2025**

						Persentase pengurangan sampah	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Persentase timbulan sampah dan sampah terpilah, terdaur ulang dan termanfaatkan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 %	310.037 Ton	26 %	7.368.675.232,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
													TOTAL	108,452,455,992,00	

**BAB V
PENUTUP**

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 8 Program, 16 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja PD menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
2. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran Bidang Lingkungan Hidup.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

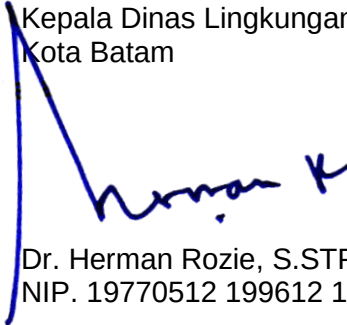
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
TAHUN 2025

Formulir E.70

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan renstra PD	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penalaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/kota	√			
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10. d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempur naan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Batam, 08 Juli 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si.
NIP. 19770512 199612 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Ir Sutami No.1 No. HP : 0811 777 6507 (Call Centre)
Website : dlh.batam.go.id, Email : dlh@batam.go.id

BATAM

Kode Pos : 29424

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 51 /K/600.4.1/XII/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM TAHUN 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

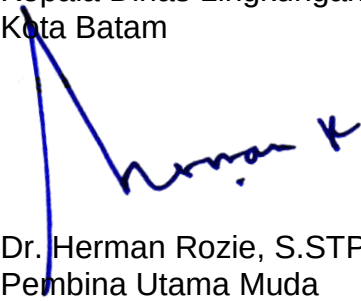
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
 23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 222 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2025 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
 Pada tanggal : 15 Desember 2023
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kota Batam


 Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770512 199612 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 51 /K/600.4.1/XII/2023
Tanggal : 15 Desember 2023
Tentang : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)

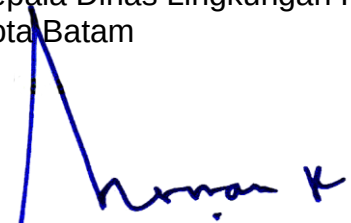
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM
TAHUN 2025

NO	JABATAN			JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM			PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM			KETUA
3	KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM			SEKRETARIS
	KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			ANGGOTA
	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH, SUB KOORDINATOR URUSAN KEUANGAN			ANGGOTA
I.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG TATA LINGKUNGAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SAPRIAL, S.Pi., M.T.	19710113 199803 1 006	Kabid Tata Lingkungan	Koordinator
2	DINA IRIANA, S.T., M.T.	19770802 200903 2 001	Pengendali Dampak Lingkungan Muda, Sub Koordinator Urusan Kajian LH dan Peran Serta Masyarakat	Anggota
3	RUDY SATRIAWANSYAH, S.STP.	19910424 201507 1 001	Pengendali Dampak Lingkungan Muda, Sub Koordinator Urusan Pelayanan Dokumen LH dan Izin PPLH	Anggota
4	DIDI WAHYUDI, S.T., M.M.	19790602 200502 1 005	Pengendali Dampak Lingkungan Muda, Sub Koordinator Urusan Informasi LH	Anggota

II.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I P, ST., MT.	19760313 200803 1 001	Kabid Perlindungan Lingkungan Hidup	Koordinator
2	DESMAYANTI, S.T.	19711201 200212 2 005	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Anggota
3	ERSAN, SKM.	19701120 199403 1 010	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Sub Koordinator Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup	Anggota
4	FITRIA RESBITA, S.Kom.	19840629 200901 2 008	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Konservasi Sumber Daya Alam	Anggota
III.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ETEK YUSRIL, S.T.	19700108 199603 1 005	Kabid Penegakan Hukum Lingkungan	Koordinator
2	SUHDI JAYA, S.H.	19780706 200801 1 014	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian	Anggota
3	WINNER PANJAITAN, S.H.	19801204 201101 1 003	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH	Anggota
4	NOVIANDRA, S.P.	19680923 199803 1 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Penindakan dan Unit Reaksi Cepat	Anggota

IV.	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	EKA SURIANTO, S.Sos.	19870101 201101 1 002	Kabid Pengelolaan Persampahan	Koordinator
2	HERI WINARSO, S.E.	19760202 199703 1 004	Kepala UPTD TPA Telaga Punggur	Anggota
3	TARMIZAN BAHARI, S.E.	19690705 200701 1 063	Kasubag. TU UPTD TPA Telaga Punggur	Anggota
4	LUKMAN HAKIM, S.STP.	19920715 201507 1 001	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Sub Koordinator Urusan Retribusi	Anggota

Batam, 15 Desember 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam



Dr. Herman Rozie, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770512 199612 1 001